

# Revenue Recognition Case Study Based on Financial Accounting Standards Statements at PT. Prambanan Dwipaka

Studi Kasus Pengakuan Pendapatan Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Pada PT. Prambanan Dwipaka

Sofia Azizatun Niza, Khojanah Hasan, Zaenuddin

**Universitas Widy Gama Malang**

Email: [sofiaaziza09@gmail.com](mailto:sofiaaziza09@gmail.com)

**Abstract** - The construction sector is characterized by complex, long-term contracts and uncertainty, making revenue recognition a critical aspect for the reliability of financial statements. Since the enactment of Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) 72 in 2020 as an adoption of International Financial Reporting Standards (IFRS) 15, construction companies in Indonesia are required to align their accounting practices with the principles of control and performance obligations. This case study examines the implementation of PSAK 72 at PT. Prambanan Dwipaka using a qualitative approach through interviews, observations, and document analysis. The study results indicate that the company has attempted to systematically implement the five stages of PSAK 72, although it still faces obstacles in identifying performance obligations and allocating transaction prices due to contract changes and inter-departmental coordination. This case study enhances understanding of PSAK 72 implementation in the construction sector, particularly regarding the role of organizational factors in accounting decision-making. PT. Prambanan Dwipaka has demonstrated efforts to implement the standard, but still requires improvements in documentation and internal controls. Future case studies are recommended to involve more companies to provide a more comprehensive picture of PSAK 72 implementation in Indonesia.

**Keywords:** PSAK 72, Revenue Recognition, Construction Services.

**Abstrak** - Bidang konstruksi memiliki karakter kontrak jangka panjang yang kompleks serta penuh ketidakpastian, sehingga penentuan pengakuan pendapatan menjadi aspek penting bagi keandalan laporan keuangan. Sejak diberlakukannya Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 72 pada tahun 2020 sebagai adopsi dari *International Financial Reporting Standards* (IFRS) 15, perusahaan konstruksi di Indonesia wajib menyesuaikan praktik akuntansinya dengan prinsip pengendalian dan kewajiban kinerja. Studi kasus ini menelaah penerapan PSAK 72 pada PT. Prambanan Dwipaka dengan pendekatan kualitatif melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Hasil studi menunjukkan perusahaan telah berupaya menerapkan lima tahapan PSAK 72 secara sistematis, meski masih menghadapi kendala dalam identifikasi kewajiban pelaksanaan dan alokasi harga transaksi akibat perubahan kontrak dan koordinasi antar bagian. Studi kasus ini memperkaya pemahaman tentang implementasi PSAK 72 di sektor konstruksi, khususnya terkait peran faktor organisasi dalam pengambilan keputusan akuntansi. PT. Prambanan Dwipaka telah menunjukkan upaya penerapan standar, namun masih memerlukan perbaikan dokumentasi dan pengendalian internal. Studi kasus selanjutnya dianjurkan melibatkan lebih banyak perusahaan untuk memberikan gambaran lebih komprehensif tentang penerapan PSAK 72 di Indonesia.

**Kata Kunci** : PSAK 72, Pengakuan Pendapatan, Jasa Konstruksi

## 1. PENDAHULUAN

Industri konstruksi memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi global maupun nasional, terutama melalui kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan penciptaan lapangan kerja. Di Indonesia, sektor ini menjadi tulang punggung pembangunan infrastruktur yang masif dalam dekade terakhir. Namun, karakter kontrak yang panjang, kompleks, dan sarat ketidakpastian menjadikan

pengakuan pendapatan sebagai isu krusial dalam menjaga akurasi serta transparansi laporan keuangan. Laporan keuangan yang tidak mencerminkan kondisi aktual berisiko menyesatkan pengambilan keputusan manajerial maupun kebijakan publik.

Untuk menjawab tantangan tersebut, sejak 1 Januari 2020 Indonesia memberlakukan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 72 [1] sebagai hasil adopsi IFRS (*International*

*Financial Reporting Standards*) 15. Standar ini menggeser paradigma lama yang berbasis risiko dan manfaat menuju pengakuan pendapatan berbasis kendali atas barang atau jasa. Penerapan lima tahapan dalam PSAK 72 mulai dari identifikasi kontrak hingga pengakuan pendapatan ditujukan agar informasi keuangan lebih konsisten, transparan, dan relevan. Meski demikian, implementasinya pada sektor konstruksi tidak sederhana, mengingat perubahan kontrak, variasi pekerjaan, serta koordinasi antar bagian sering kali menjadi hambatan [2].

Sejumlah studi terdahulu menunjukkan bahwa perusahaan konstruksi menghadapi kendala teknis dan prosedural, seperti kesulitan dalam mengidentifikasi kewajiban pelaksanaan [3], kelemahan dokumentasi kontrak [4], serta alokasi harga transaksi yang belum optimal [5]. Studi kuantitatif juga mengungkap fluktuasi laba akibat transisi standar [6]. Namun, pendekatan ini belum sepenuhnya menggambarkan dinamika sosial, budaya organisasi, maupun proses interpretatif yang memengaruhi praktik pengakuan pendapatan. Hal ini menandakan adanya kesenjangan literatur yang memerlukan kajian kualitatif lebih mendalam.

Dalam praktik nyata, pengakuan pendapatan tidak hanya ditentukan oleh regulasi teknis, tetapi juga dipengaruhi tekanan eksternal dari auditor, regulator, maupun pemilik proyek [7]. Faktor sosial dan organisasi turut menentukan bagaimana standar dipahami dan dijalankan oleh aktor perusahaan. Oleh karena itu, pendekatan kualitatif berbasis studi kasus dianggap paling relevan untuk menggali pengalaman, strategi adaptasi, serta pemaknaan subjektif pelaku organisasi dalam mengimplementasikan PSAK 72.

Studi kasus ini berfokus pada PT. Prambanan Dwipaka, sebuah perusahaan jasa konstruksi yang aktif mengerjakan proyek infrastruktur besar di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, studi ini bertujuan mengeksplorasi praktik penerapan PSAK 72 dalam pengakuan pendapatan proyek konstruksi, sekaligus menilai pengalaman dan strategi adaptasi organisasi. Kontribusi studi ini tidak hanya bersifat teoretis dalam memperkaya literatur akuntansi berbasis praktik, tetapi juga praktis bagi perusahaan konstruksi untuk meningkatkan akurasi pelaporan keuangan, memperkuat dokumentasi, serta memperbaiki koordinasi lintas divisi.

## 2. METODE PELAKSANAAN

Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan strategi studi kasus untuk memahami secara mendalam praktik pengakuan pendapatan berdasarkan PSAK 72 pada perusahaan jasa konstruksi. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggali makna, pengalaman, dan proses yang terjadi di lapangan, yang tidak dapat dijelaskan secara memadai dengan metode kuantitatif [8]. Studi kasus dipandang relevan untuk menelaah fenomena implementasi standar akuntansi dalam konteks nyata perusahaan.

Studi dilaksanakan di PT. Prambanan Dwipaka, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang jasa konstruksi. Studi dilaksanakan selama periode Januari hingga Juni 2025, menyesuaikan dengan ketersediaan data, jadwal proyek, serta kesediaan informan dalam memberikan informasi.

Populasi studi mencakup seluruh pihak yang terlibat dalam pengelolaan keuangan dan pengakuan pendapatan di perusahaan. Informan ditentukan secara *purposive* dengan mempertimbangkan keterlibatan langsung mereka dalam praktik pencatatan dan pelaporan keuangan. Sampel studi terdiri dari staf keuangan, manajer proyek, serta pihak manajemen yang terlibat dalam penyusunan laporan keuangan. Pemilihan ini dilakukan untuk memperoleh variasi perspektif yang mencerminkan realitas organisasi.

Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur untuk memungkinkan eksplorasi lebih luas, sedangkan observasi dilakukan untuk memahami praktik langsung di perusahaan. Dokumen internal perusahaan dianalisis guna mendukung dan memperkuat data primer.

Instrumen studi utama adalah *human instrument*, dibantu dengan pedoman wawancara mendalam, lembar observasi, serta dokumen pendukung seperti kontrak proyek dan laporan keuangan. Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber, metode, dan waktu, sementara keandalan diperkuat dengan *member checking* kepada informan kunci.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode analisis interaktif, yang meliputi tahap reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Proses analisis berlangsung secara simultan sejak awal pengumpulan data hingga akhir studi. Pendekatan ini memungkinkan interpretasi mendalam atas praktik pengakuan pendapatan, serta mengaitkannya dengan prinsip PSAK 72.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Data dan Analisis

Hasil studi (Tabel 1) menemukan bahwa implementasi PSAK 72 pada PT. Prambanan Dwipaka berjalan melalui lima tahapan utama, namun tidak lepas dari kendala praktis. Tahap identifikasi kontrak relatif mudah dilakukan karena perusahaan telah memiliki prosedur administrasi proyek yang baku. Akan tetapi, permasalahan muncul dalam identifikasi kewajiban pelaksanaan, terutama ketika terjadi perubahan lingkup pekerjaan atau adendum kontrak. Seorang staf keuangan menyatakan, *"Setiap kali ada revisi kontrak, kami harus menyesuaikan pencatatan, dan itu sering memicu perbedaan persepsi antar bagian"*. Hal ini menunjukkan bahwa dinamika kontrak memengaruhi konsistensi pencatatan pendapatan.

**Tabel 1.** Data dan Hasil Temuan

Temuan Penelitian	Dampak terhadap Pengakuan Pendapatan
Penggunaan metode over time berdasarkan progres proyek	Pendapatan dapat mencerminkan progres pekerjaan secara lebih realistis
BAPP menjadi dasar utama pengakuan pendapatan	Pengakuan pendapatan memiliki bukti administratif yang jelas
Belum terdapat SOP formal terkait PSAK 72	Berpotensi menimbulkan inkonsistensi pencatatan antar proyek
Keterlambatan penerbitan BAPP	Menimbulkan risiko cut-off laporan keuangan
Performance obligation belum dipisahkan secara detail	Pengukuran pendapatan masih bersifat umum/agregat

Temuan lain menunjukkan bahwa penentuan harga transaksi umumnya mengikuti perjanjian kontrak awal, namun kerap dipengaruhi fluktuasi biaya material dan jasa. Dampaknya, alokasi harga transaksi ke kewajiban pelaksanaan menjadi cukup rumit. Observasi lapangan juga mengungkap bahwa keterlambatan penyampaian progres proyek dari bagian teknis kepada bagian keuangan menyebabkan pengakuan pendapatan tidak selalu tepat waktu. Selain itu, dokumentasi kontrak yang belum sepenuhnya konsisten menambah kompleksitas dalam menjaga kesesuaian dengan PSAK 72.

#### Analisis Kesesuaian Penerapan PSAK 72

##### a. Identifikasi Kontrak

PSAK 72 menekankan pentingnya kontrak sebagai dasar pengakuan pendapatan. PT. Prambanan Dwipaka telah melaksanakan tahap ini dengan cukup baik karena setiap proyek

dituangkan dalam kontrak tertulis yang memuat lingkup pekerjaan, nilai, jangka waktu, serta mekanisme pembayaran. Praktik ini menunjukkan kesesuaian dengan standar, sebab kontrak menjadi acuan utama dalam pencatatan pendapatan perusahaan. Dengan demikian, tahap identifikasi kontrak dapat dinilai konsisten dengan ketentuan PSAK 72.

##### b. Identifikasi Kewajiban Pelaksanaan

Standar mewajibkan perusahaan untuk mengidentifikasi kewajiban pelaksanaan secara terpisah agar pengakuan pendapatan dapat dilakukan lebih akurat. Dalam praktiknya, PT. Prambanan Dwipaka masih menghadapi kendala pada tahap ini, terutama ketika kontrak mengalami perubahan atau pekerjaan tambahan. Seorang staf mengungkapkan, *"Kadang sulit menentukan apakah pekerjaan tambahan harus dianggap sebagai kewajiban baru atau bagian dari kontrak lama"*. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun perusahaan berusaha menerapkan ketentuan standar, kesesuaian dengan PSAK 72 pada tahap ini masih bersifat parsial.

##### c. Penentuan Harga Transaksi

PSAK 72 menegaskan bahwa harga transaksi harus ditentukan berdasarkan kesepakatan kontraktual dengan pelanggan. PT. Prambanan Dwipaka menjalankan ketentuan ini dengan menjadikan nilai kontrak sebagai acuan utama. Akan tetapi, perubahan biaya material dan jasa kerap mengharuskan adanya penyesuaian harga. Walaupun ada fluktuasi biaya, praktik ini tetap menunjukkan kepatuhan terhadap PSAK 72 karena setiap penyesuaian tetap tercatat dalam dokumen kontrak yang sah.

##### d. Alokasi Harga Transaksi

PSAK 72 mengatur bahwa harga transaksi dialokasikan ke setiap kewajiban pelaksanaan sesuai proporsi nilai relatifnya. Dalam praktiknya, perusahaan mengalami kesulitan karena alokasi sering dipengaruhi oleh perubahan kontrak maupun keterlambatan informasi progres proyek. Observasi lapangan menunjukkan bahwa koordinasi antara bagian teknis dan keuangan menjadi titik lemah, sehingga alokasi harga transaksi tidak selalu sesuai dengan ketentuan standar. Dengan demikian, tahap ini masih membutuhkan perbaikan agar sepenuhnya konsisten dengan PSAK 72.

##### e. Pengakuan Pendapatan

Menurut PSAK 72, pendapatan diakui ketika kewajiban pelaksanaan terpenuhi, baik

pada satu waktu maupun sepanjang waktu. PT. Prambanan Dwipaka sudah berusaha menerapkan prinsip ini, namun dalam praktiknya pengakuan pendapatan kadang masih mengikuti termin pembayaran. Hal ini terjadi ketika laporan *progress* proyek tidak segera diterima oleh bagian keuangan. Dengan demikian, pengakuan pendapatan di perusahaan ini belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan PSAK 72.

### **Pembahasan**

Secara keseluruhan, praktik PT. Prambanan Dwipaka sudah menunjukkan arah kepatuhan terhadap PSAK 72, khususnya pada tahap identifikasi kontrak dan penentuan harga transaksi. Namun, kesesuaian penuh belum tercapai pada aspek identifikasi kewajiban pelaksanaan, alokasi harga transaksi, dan pengakuan pendapatan. Hal ini sejalan dengan temuan studi kasus sebelumnya [4][5] yang menekankan bahwa penerapan PSAK 72 pada sektor konstruksi masih menghadapi hambatan terkait dokumentasi, koordinasi, dan interpretasi kewajiban kontrak.

Temuan studi ini menguatkan relevansi teori keagenan, di mana perbedaan kepentingan dan koordinasi antara agen (manajemen) dan prinsipal (pemilik/pemangku kepentingan) berpengaruh pada kualitas pelaporan keuangan. PSAK 72 berfungsi sebagai mekanisme yang menekan potensi asimetri informasi, tetapi efektivitasnya bergantung pada kesiapan internal perusahaan. Hasil ini sejalan dengan Fauziyyah [4] yang menemukan bahwa dokumentasi kontrak yang lemah menjadi hambatan utama implementasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 72.

Studi ini juga memperlihatkan kemiripan dengan studi Putri dan Sudrajat [5], yang menemukan bahwa pengakuan pendapatan pada perusahaan konstruksi masih sering dipengaruhi oleh termin pembayaran dibandingkan kewajiban pelaksanaan. Namun, berbeda dengan studi tersebut, PT. Prambanan Dwipaka sudah berupaya mengintegrasikan konsep kewajiban pelaksanaan meski penerapannya belum konsisten. Hal ini mengonfirmasi temuan Rahmawati [9] dan Miradji et al [10] bahwa PSAK 72 meningkatkan transparansi, tetapi menuntut adaptasi signifikan dalam sistem pelaporan.

Secara teoretis, studi ini menegaskan bahwa standar akuntansi bukan sekadar pedoman teknis, melainkan praktik sosial yang dipengaruhi dinamika organisasi dan budaya kerja. Secara praktis, studi ini memberikan kontribusi dengan menunjukkan pentingnya

koordinasi lintas divisi dan penguatan dokumentasi kontrak untuk meningkatkan akurasi pelaporan keuangan.

Keterbatasan studi ini terletak pada lingkup studi kasus tunggal, sehingga generalisasi hasil masih terbatas. Untuk studi mendatang, disarankan melibatkan lebih banyak perusahaan konstruksi agar diperoleh gambaran komparatif mengenai variasi implementasi PSAK 72 di Indonesia.

### **4. PENUTUP**

Penerapan PSAK 72 pada PT. Prambanan Dwipaka telah dilakukan melalui lima tahapan utama, yaitu identifikasi kontrak, identifikasi kewajiban pelaksanaan, penentuan harga transaksi, alokasi harga transaksi, dan pengakuan pendapatan. Secara umum perusahaan telah menunjukkan kesesuaian terhadap standar, terutama pada identifikasi kontrak dan penentuan harga transaksi. Namun, masih ditemukan kendala pada identifikasi kewajiban pelaksanaan, alokasi harga transaksi, dan pengakuan pendapatan yang dipengaruhi perubahan kontrak, dokumentasi yang belum konsisten, serta koordinasi antar bagian yang belum optimal.

Hasil studi ini menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi tidak hanya dipengaruhi aspek teknis, tetapi juga efektivitas koordinasi dan sistem kerja perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan perlu meningkatkan kualitas dokumentasi kontrak dan koordinasi lintas divisi guna mendukung penerapan PSAK 72 secara lebih konsisten. Studi selanjutnya disarankan melibatkan lebih banyak perusahaan konstruksi dengan karakteristik proyek yang beragam agar diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai implementasi PSAK 72 di sektor konstruksi. Implikasi studi menegaskan pentingnya penguatan sistem administrasi dan koordinasi internal perusahaan dalam mendukung efektivitas penerapan PSAK 72 pada sektor jasa konstruksi.

### **PENGHARGAAN**

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh karyawan PT. Prambanan Dwipaka khususnya staf akuntansi, manajer keuangan dan manajer proyek yang telah memberikan dukungan, informasi, dan kerja sama.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- [1] IAI. (2020). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 72: Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan*. Ikatan

- Akuntan Indonesia.
- [2] Puspamurti, H., & Firmansyah, A. (2020). Penerapan PSAK 72 terkait Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan pada PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. *Indonesian Journal of Accounting and Governance*, 4(2), 73–110. <https://doi.org/10.36766/ijag.v4i2.129>
- [3] Anggraini, N., & Tyas, A. M. (2023). Analisis Penerapan Metode Pengakuan Pendapatan Menurut Sak Etap Dan Psak 72 Pada Pt. Gunawangsa Putra Perkasa. *Akmen Jurnal Ilmiah*, 20(1), 26–38. <https://ejournal.nobel.ac.id/index.php/akmen>
- [4] Fauziyyah, N. F. (2023). *Analisis Akuntansi Pendapatan Dan Biaya Konstruksi Berdasarkan Psak Nomor 72 Pada CV. Alpagker Abadi Curup*. Tugas Akhir. Politeknik Rafflesia.
- [5] Putri, N. T., & Sudradjat, S. (2022). Tinjauan atas Pengakuan, Pencatatan dan Pelaporan Pendapatan Berdasarkan PSAK 72 pada PT ABC. *Jurnal Aplikasi Bisnis Kesatuan*, 2(2).
- [6] Adella, M., Dewi, N. S., & Ahalik, A. (2021). Analisis Penerapan Pengakuan Pendapatan PSAK72 dan Dampak terhadap Pajak Penghasilan Final dan Manajemen Laba pada Perusahaan Kontruksi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019. *Journal of Management and Business Review*, 18(3), 582–598. <https://doi.org/10.34149/jmbr.v18i3.247>
- [7] A. Rohmawati (2023). Analisa Prediksi Kebangkrutan Dengan Model Altman Z-Score Pada Perusahaan Sub-Sektor Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019 Sampai Dengan 2021. Skripsi. FEB Universitas MH Thamrin.
- [8] Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2016). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches*. Sage publications.
- [9] Rahmawati, C. N. (2024). *Analisis Pengakuan Pendapatan Berdasarkan PSAK 72 Terhadap Kinerja Laporan Keuangan PT IMSC*. Universitas Islam Indonesia.
- [10] MA. Miradji, RTI. Aisyah, RR. Wijaya, et.al (2025) *Strategi Penyusunan Laporan Keuangan yang Efektif dan Transparan*. *Jurnal Inovasi Manajemen, Kewirausahaan, Bisnis dan Digital*, 2(3). 31-44

*Ruang kosong ini untuk menggenapi jumlah halaman sehingga jika dicetak dalam bentuk buku, setiap judul baru akan menempati halaman sisi kanan buku.*